

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerjasama keantariksaan antara Tiongkok dan Indonesia di bidang antariksa adalah dikarenakan kepentingan kedua negara dalam bidang antariksa. Di satu sisi, Tiongkok sebagai negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi baru di dunia, telah memiliki teknologi antariksa yang sudah dapat menyaingi AS dan negara-negara Eropa dalam waktu yang singkat saja. Hal ini menjadikan Tiongkok melakukan usaha lain untuk menyebarkan kekuatannya dengan menggunakan isu antariksa. Salah satu cara yang digunakan adalah melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki potensi dalam antariksa namun tidak memiliki pengetahuan yang maju tentang teknologi-teknologi antariksa. Kerjasama yang dilakukan Tiongkok, dilakukan salah satunya dengan membentuk organisasi regional keantariksaan di Asia Pasifik, yaitu dengan APSCO. Dari APSCO ini juga lah, Indonesia memulai hubungan kerjasama khususnya di bidang antariksa dengan Tiongkok.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi dalam keantariksaan, salah satunya adalah wilayah geografisnya yang strategis karena berada di garis katulistiwa. Wilayah di garis katulistiwa ini merupakan sebuah wilayah yang penting bagi keantariksaan, karena dapat dijadikan tempat peluncuran dan control satelit yang berada di GSO. Selain itu juga Indonesia memiliki sebuah *space agency* yang sudah lama terbentuk, yaitu LAPAN. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah sejak lama memahami pentingnya isu antariksa di berbagai sektor. LAPAN sendiri juga merupakan sebuah Lembaga negara yang aktif dalam kegiatan organisasi internasional. Misalnya saja di UNCOPOUS dan juga APSCO. Selain organisasi, LAPAN sebagai Lembaga pelaksana kegiatan antariksa di Indonesia menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan Indonesia, sudah sering kali melaksanakan kerjasama bilateral dengan banyak negara, salah satunya adalah Tiongkok.

Kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia secara umum, sebenarnya telah terlaksana sejak masa Presiden Soeharto. Namun, secara spesifik dalam kerjasama keantariksaan, kerjasama kedua negara telah terjalin sejak konvensi APSCO tahun 2005. Setelah itu, Tiongkok melakukan kerjasama keantariksaan dengan kesepakatan misi TT&C GNSS Beidou oleh kapal MV Yuan Wang milik Tiongkok yang akan berlayar di wilayah Indonesia. Sejak saat ini kepentingan Tiongkok dalam bidang antariksa di Indonesia semakin besar.

Lalu pada tahun 2013, kedua negara yang sudah lama melakukan kerjasama keantariksaan, kemudian membuat sebuah kesepakatan kerjasama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai atau *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Use of Outer Space*, yang kemudian merumuskan sebelas poin bidang kerjasama antariksa. Sebelas poin kerjasama ini kemudian menjadi MOU Garis Besar Kerjasama di Bidang Kedirgantaraan 2015-2020 Antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia (LAPAN) dan Administrasi Antariksa Nasional Republik Rakyat Tiongkok (CNSA), yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam *Comprehensive Strategic Partnership (CSP)* antara Tiongkok dan Indonesia, untuk periode 2015-2020 pada tahun 2015.

Sebelas poin bidang kerjasama antariksa tersebut mencakup kerjasama di bidang Peluncuran satelit, Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kemaritiman, Peluncuran Satelit Observasi bumi, Satelit komunikasi, Satelit navigasi, Kerjasama riset dan pengembangan sistem penguatan, layanan, dan terminal satelit navigasi, Roket sonda, Fasilitas keantariksaan, Sub sistem/ instrument/komponen/material satelit, Sains antariksa, Pelatihan dan pendidikan, teknologi aeronautika. Kerjasama ini akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2020 oleh LAPAN dan CNSA.

Dari data yang didapatkan oleh Lembaga yang terkait, kerjasama yang terjalin antara Tiongkok dan Indonesia berdasarkan *Comprehensive Strategic Partnership (CSP)* periode 2015-2020 dalam bidang antariksa telah berjalan dengan baik. Sebelas poin kerjasama yang telah dirumuskan oleh kedua negara, memberikan keuntungan yang tepat sasaran sesuai dengan kepentingan nasional kedua negara dalam bidang keantariksaan.

Namun, beberapa kendala yang harus dihadapi oleh kedua negara, misalnya saja *Missile Technology Control Regime* atau MTCR yang menjadikan alih teknologi roket dan satelit menjadi sensitive untuk dibahas apa lagi dilaksanakan. Hal ini yang menjadikan kerjasama antar kedua negara banyak dilakukan dalam bentuk *transfer of knowledge*. Kendala lainnya juga berasal dari birokrasi Indonesia yang menyebabkan beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi antariksa di Indonesia lambat dan kurang diperhatikan. Hal ini juga yang berpengaruh kepada terhambatnya salah satu bidang kerjasama Tiongkok-Indonesia, yaitu misi kapal MV Yuan Wang milik Tiongkok terhambat.

VI.2. Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang penulis ajukan, yang pertama adalah kerjasama keantariksaan antara Tiongkok dan Indonesia bisa lebih dieksplor lagi. Sebelas bidang kerjasama pada *Comprehensive Strategic Partnership (CSP)* antara Tiongkok dan Indonesia, untuk periode 2015-2020 di bidang antariksa, dapat dibahas lagi dengan mengkaji efektifitas dari setiap bidang kerjasama. Sehingga ke depannya, kerjasama kedua negara dapat terlaksana secara lebih efektif.

Selain itu saran untuk objek penelitian, bahwa kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia di bidang antariksa merupakan sebuah kerjasama yang menguntungkan. Apa lagi mengetahui tren terhadap teknologi antariksa yang makin populer di seluruh dunia. Bukan hanya aktor negara saja, tapi juga aktor MNC. Maka dari itu negara harus memiliki keinginan dalam usahanya untuk mengembangkan teknologi antariksa. Dukungan seperti dana anggaran dan perangkat hukum dapat diberikan ke Lembaga terkait. Sehingga Lembaga keantariksaan dapat lebih mengembangkan teknologi tingkat tinggi, seperti roket dan satelit.

Lalu, yang terakhir adalah keantariksaan dalam Ilmu Hubungan Internasional merupakan sebuah isu yang menarik yang masih jarang untuk dibahas, terutama dalam hal kerjasama dan pertahanan dan keamanan internasional. Kedepannya keantariksaan bisa dapat terus dikaji dengan prespektif Ilmu Hubungan Internasional.